



Katalog BPS: 7203002.72

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 2012



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

STATISTIK KEUANGAN DAERAH
SULAWESI TENGAH
2012



BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH

STATISTIK KEUANGAN DAERAH SULAWESI TENGAH 2012

Katalog : 7203002.72

ISBN : 979 480 921 7

No. Publikasi : 72000.1101

Ukuran Buku : 21.4 x 27.9 cm

Jumlah Halaman : 41 + vii

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Penyunting :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak Oleh :
Percetakan Rio Palu

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012, merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Data yang disajikan dalam penerbitan ini meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumber utama data berasal dari laporan Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan laporan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2008 - 2010.

Disadari sepenuhnya, bahwa data yang disajikan masih mempunyai berbagai kelemahan walaupun telah disiapkan semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya publikasi ini tepat waktu kami ucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan secara khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah membantu menyediakan data yang diperlukan.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkannya.

Palu, April 2012

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. Ibram Syahboedin, MA
NIP. 195811211980031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data	2
1.3. Konsep dan Definisi	3
II. ULASAN RINGKAS	
2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5
2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota	7
2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota	13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 – 2010	18
Tabel 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 – 2010	19
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kab.Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2008 – 2010	20
Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2008 – 2010	21
Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008 – 2010	22
Tabel 6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008 – 2010	23
Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2008 – 2010	24
Tabel 8. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2008 – 2010	25
Tabel 9. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2008 – 2010	26
Tabel 10. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2008 – 2010	27
Tabel 11. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 – 2010	28
Tabel 12. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 – 2010	29
Tabel 13. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2008 – 2010	30

Tabel 14. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2008 – 2010	31
Tabel 15. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2008 – 2010	32
Tabel 16. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2008 – 2010	33
Tabel 17. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2008 – 2010	34
Tabel 18. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2008 – 2010	35
Tabel 19. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2008 – 2010	36
Tabel 20. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun Anggaran 2008 – 2010	37
Tabel 21. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2008 – 2010	38
Tabel 22. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2008 – 2010	39
Tabel 23. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2008 – 2010	40
Tabel 24. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2008 – 2010	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 – 2010	6
Gambar 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 – 2010	7
Gambar 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010	8
Gambar 4. Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010	9
Gambar 5. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010	14
Gambar 6. Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2010	15

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia semakin mempertegas kewenangan dan fungsi pemerintah daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perimbangan keuangan dimaksudkan untuk menjaga dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Dengan segala kewenangan dan sumber keuangan yang memadai diharapkan pemerintah daerah lebih dapat leluasa dalam merencanakan pembangunan dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terus diupayakan untuk ditingkatkan selaras dengan program pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terwujud keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional menuju cita – cita bersama yaitu mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di antaranya adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah dengan asas transparansi dan akuntabel melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara bahwa perhitungan perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan sekaligus kegunaan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun ditingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Untuk mengetahui potensi dan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data Statistik Keuangan Daerah diperoleh dari Laporan Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dipindahkan oleh petugas statistik kedalam daftar K-1 dan K-2 yang telah dipersiapkan dari BPS Pusat. Periode data yang dicakup dalam sajian ini adalah tahun fiskal/anggaran yang terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember.

1.3. Konsep dan Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Keuangan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya, bagian PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. **Dana Perimbangan**, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. **Lain-lain Pendapatan yang Sah**, merupakan pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan dana bantuan kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, merupakan bagian belanja yang dianggarkan dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah lain dan belanja tidak terduga.
- b. **Belanja Langsung**, merupakan bagian belanja yang dianggarkan dan memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja barang modal.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. **Penerimaan Pembiayaan**, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, transfer dana cadangan, pinjaman dan obligasi serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
- b. **Pengeluaran Pembiayaan**, terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok serta SILPA tahun berjalan.

II. ULASAN RINGKAS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai regulator dan pelayan masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memajukan suatu daerah sangat tergantung kebijakan pengalokasian dana APBD untuk pelaksanaan program-program pembangunan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, APBD dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

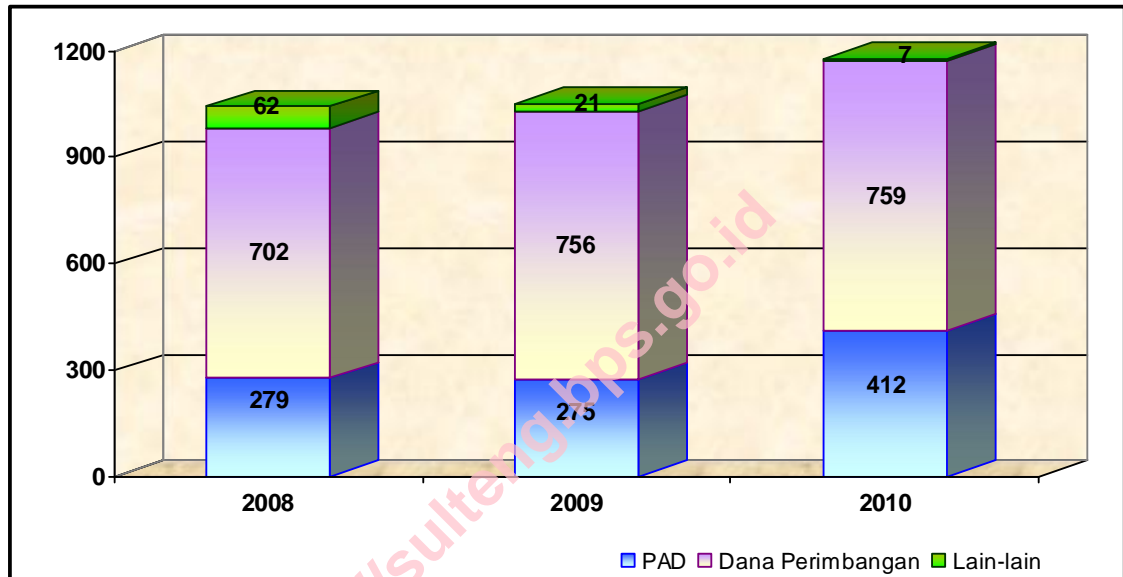
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Selanjutnya bagian Dana Perimbangan sebagai komponen terbesar Pendapatan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Komposisi Belanja Daerah dapat menunjukkan prioritas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010 tercatat sejumlah 1.177,6 milyar rupiah atau meningkat 11,90 persen dari tahun 2009. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,95 persen. Pesatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh tingginya peningkatan realisasi bagian PAD sebesar 49,64 persen. Pada saat yang sama bagian dana perimbangan hanya tumbuh sebesar 0,36 persen, namun tidak menggeser peranannya sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah yang mencapai sebesar 64,47 persen dari keseluruhan anggaran pendapatan daerah tahun 2010. Lebih lanjut, Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah 659,3 milyar rupiah yang berasal dari pemerintah pusat memiliki andil

sebesar 55,99 persen terhadap total anggaran pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010.

Gambar 1.
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2008-2010 (milyar rupiah)

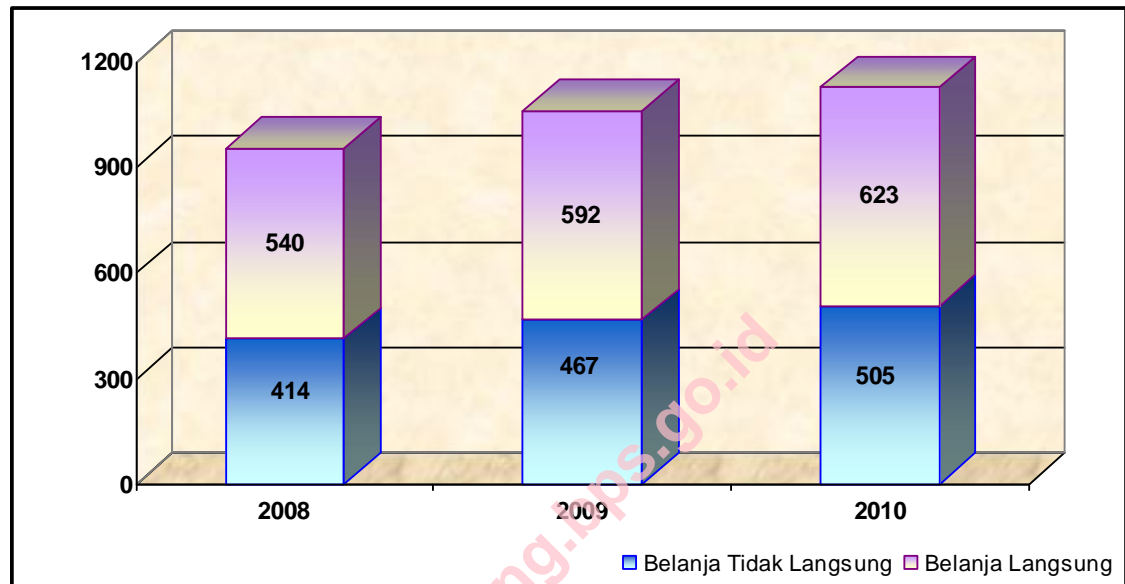


Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

2.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tahun 2010, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sejumlah 1.127,3 milyar rupiah, meningkat 6,37 persen dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya yang mencapai 1.059,7 milyar rupiah. Sebesar 44,77 persen realisasi belanja tersebut terserap pada belanja tidak langsung atau setara dengan 504,7 milyar rupiah, sedangkan sebesar 55,23 persen sisanya terserap pada belanja langsung yaitu sejumlah 622,6 milyar rupiah. Porsi belanja pegawai keseluruhan baik yang berasal dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah mencapai angka yang cukup besar yakni 31,08 persen atau sejumlah 350,4 milyar rupiah, sedangkan alokasi untuk belanja modal dari total nilai belanja daerah hanya sebesar 18,08 persen atau sejumlah 203,8 milyar rupiah.

Gambar 2.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2008-2010 (milyar rupiah)



Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

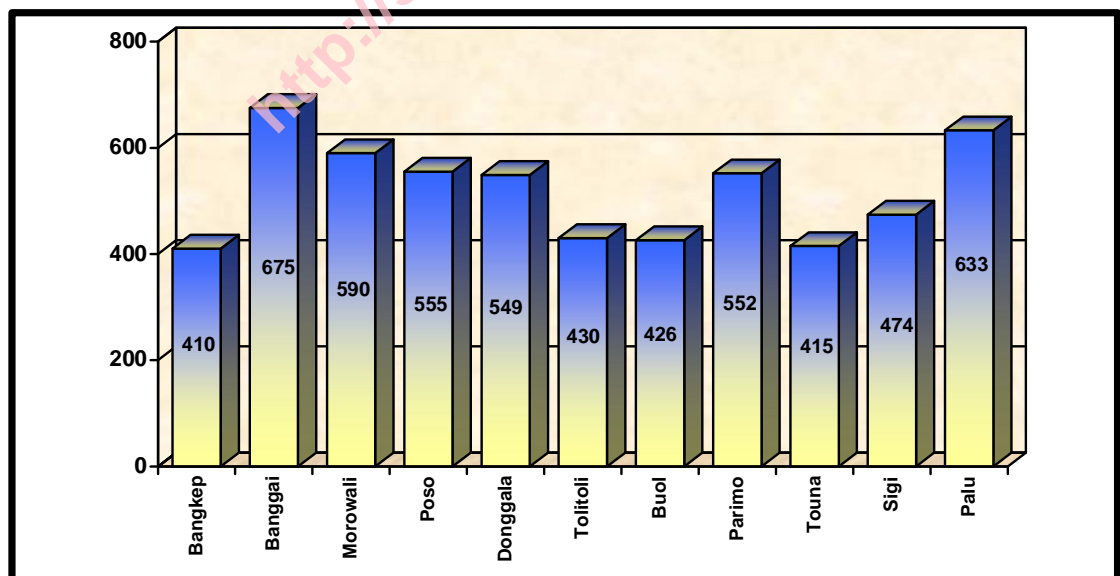
2.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum realisasi pendapatan daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali dua kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una yang mengalami penurunan masing-masing sebesar -3,12 persen dan -2,06 persen. Penurunan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Poso utamanya disebabkan oleh menurunnya PAD yang mencapai -8,08 persen. Di Kabupaten Tojo Una-Una penurunan realisasi disebabkan oleh menurunnya bagian pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar -26,39 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi pendapatan daerah yang cukup tinggi di atas 20 persen pada tahun anggaran 2010 dicapai oleh Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala yaitu masing-masing sebesar 92,32 persen dan 23,17 persen.

Sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota pada tahun 2010 mengalami peningkatan realisasi jumlah PAD, sementara 5 kabupaten lainnya mengalami penurunan. Peningkatan PAD tertinggi berhasil dicapai oleh Kabupaten Sigi sebesar 237,12 persen dari 2,9 milyar rupiah menjadi 10,1 milyar rupiah, sedangkan peningkatan terendah dicapai oleh Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 2,34 persen. Selanjutnya penurunan PAD tertinggi oleh Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar -34,63 persen dari 9,9 milyar rupiah menjadi hanya 6,5 milyar rupiah, sementara penurunan terendah oleh Kabupaten Morowali sebesar -8,00 persen. Apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka proporsi tertinggi dicapai oleh Kota Palu dengan besaran 8,99 persen, diikuti oleh Kabupaten Tojo Una-Una di urutan kedua sebesar 4,81 persen, Kabupaten Donggala di urutan ketiga sebesar 4,25 persen, dan yang terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 1,59 persen.

Gambar 3.

**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2010 (milyar rupiah)**

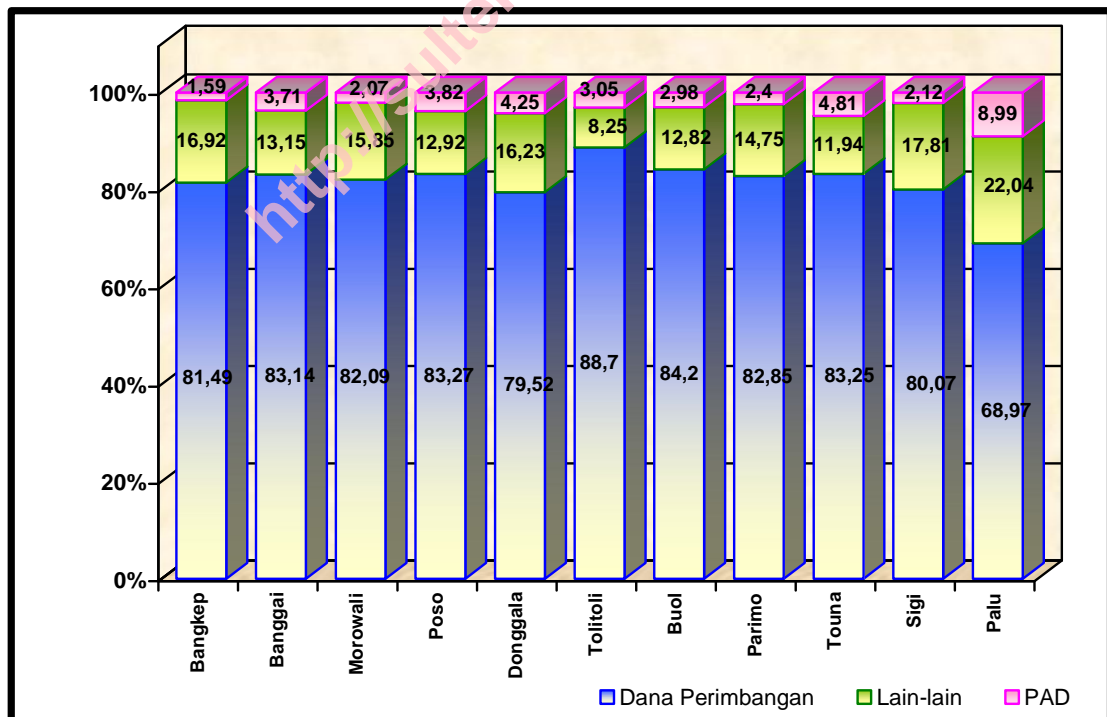


Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2010 tercatat sebesar 409,6 milyar rupiah, meningkat 4,27 persen dari

tahun sebelumnya sebesar 392,8 milyar rupiah. Peningkatan anggaran didorong oleh kenaikan realisasi bagian lain – lain pendapatan daerah yang sah dan bagian dana perimbangan masing-masing sebesar 23,60 persen dan 2,13 persen. Sebaliknya bagian PAD pada tahun 2010 tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -34,62 persen dari 9,9 milyar rupiah hingga hanya mencapai 6,5 milyar rupiah. Perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya struktur pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan dari 83,19 persen andil dana perimbangan terhadap total pendapatan menjadi sekitar 81,49 persen, bagian pendapatan daerah yang sah lainnya berubah dari 14,28 persen menjadi sekitar 16,92 persen, sedangkan bagian PAD berubah dari 2,53 persen menjadi hanya sekitar 1,59 persen.

Gambar 4.
Struktur Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2010 (dalam %)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Banggai tahun anggaran 2010 mencatat peningkatan realisasi pendapatan daerah sebesar 7,18 persen dari 630,1 milyar rupiah menjadi 675,4

milyar rupiah. Peningkatan tertinggi disumbangkan oleh bagian pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 24,54 persen, diikuti oleh bagian dana perimbangan sebesar 5,05 persen dan bagian PAD sebesar 3,09 persen dibandingkan tahun anggaran 2009. Struktur pendapatan daerah di kabupaten banggai pada tahun anggaran 2010 masih didominasi oleh andil dari bagian dana perimbangan sebesar 83,14 persen, kemudian diikuti oleh bagian pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 13,15 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,71 persen.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Morowali pada tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan sebesar 11,25 persen (59,7 milyar rupiah) dari tahun anggaran 2009. Peningkatan tersebut disebabkan bagian pendapatan daerah yang sah lainnya mengalami peningkatan sebesar 57,66 persen dan bagian dana perimbangan sebesar 5,79 persen. Sebaliknya pada saat yang sama bagian PAD mengalami penurunan sebesar -7,80 persen menjadi 12,2 milyar rupiah setelah sebelumnya tercatat sebesar 13,2 milyar rupiah. Sumbangan terbesar terhadap jumlah total pendapatan daerah diberikan oleh bagian dana perimbangan yang mencapai sebesar 82,09 persen, selanjutnya bagian pendapatan daerah yang sah lainnya dan PAD masing-masing menyumbangkan andil sebesar 15,85 persen dan 2,07 persen.

Kabupaten Poso pada tahun 2010 mencatat penurunan realisasi pendapatan daerah sebesar -3,12 persen dari 572,9 milyar rupiah menjadi 555,0 milyar rupiah. Bagian dana perimbangan, sebagai penyumbang 83,27 persen pendapatan daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -2,82 persen menjadi 462,1 milyar rupiah. Tahun 2010 PAD Kabupaten Poso mengalami penurunan realisasi sebesar -8,08 persen dari 23 milyar rupiah menjadi 21,2 milyar rupiah, sementara pendapatan daerah yang sah lainnya turut mengalami penurunan sebesar -3,51 persen. Fenomena tersebut sekaligus merubah struktur andil PAD terhadap pendapatan daerah menjadi sebesar 3,82 persen, sedangkan bagian pendapatan daerah yang sah lainnya mempunyai andil sebesar 12,92 persen terhadap total pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Donggala mengalami peningkatan sebesar 23,17 persen dari realisasi 445,8 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi sebesar 549,1 milyar rupiah pada tahun 2010. Peningkatan jumlah anggaran tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar 21,94 persen dibandingkan tahun 2009. Peningkatan realisasi DAU mendorong peningkatan realisasi dana perimbangan sebesar 16,98 persen, sedangkan PAD justru mengalami penurunan sebesar -31,17 persen. Penurunan realisasi PAD menyebabkan terjadinya pergeseran struktur andil PAD terhadap pendapatan daerah menjadi hanya sebesar 4,25 persen, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah lainnya tercatat masing-masing sebesar 79,52 persen dan 16,23 persen.

Peningkatan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2010 juga terjadi pada Kabupaten Tolitoli sebesar 2,99 persen. Tahun anggaran 2010 total realisasi pendapatan Kabupaten Tolitoli mencapai 430,0 milyar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 417,5 milyar rupiah. Pendapatan daerah yang sah lainnya mengalami peningkatan tertinggi sebesar 60,30 persen, sementara dana perimbangan hanya sedikit mengalami peningkatan sebesar 1,51 persen. Pada periode yang sama bagian PAD mengalami penurunan sebesar -33,26 persen. Kontribusi terbesar penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2010 adalah bagian dana perimbangan yaitu sebesar 88,70 persen, diikuti oleh bagian pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 8,25 persen dan bagian PAD sebesar 3,05 persen.

Total pendapatan daerah Kabupaten Buol tahun anggaran 2010 mencapai 426,5 milyar rupiah, meningkat 2,75 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 415,1 milyar rupiah. Peningkatan pendapatan daerah disumbangkan oleh peningkatan bagian PAD sebesar 37,24 persen diikuti oleh bagian dana perimbangan sebesar 7,11 persen. Pendapatan daerah yang sah lainnya tercatat mengalami penurunan sebesar -22,52 persen. Apabila dilihat dari strukturnya maka bagian terbesar pendapatan daerah disumbangkan oleh dana perimbangan sebesar 84,20 persen, sedangkan PAD dan pendapatan daerah yang sah lainnya masing-masing hanya menyumbangkan sebesar 2,98 persen dan 12,82 persen.

Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2010 mencatat realisasi pendapatan sebesar 551,7 milyar rupiah atau meningkat 11,11 persen dibandingkan tahun 2009 yang hanya tercatat sebesar 496,5 milyar rupiah. Peningkatan tersebut didorong oleh bagian pendapatan daerah yang sah lainnya yang meningkat sebesar 234,32 persen, diikuti oleh bagian PAD yang turut meningkat sebesar 17,45 persen. Struktur pendapatan daerah didominasi oleh bagian dana perimbangan dengan andil sebesar 82,85 persen, selanjutnya andil bagian PAD dan pendapatan daerah yang sah lainnya terhadap total pendapatan daerah berturut-turut sebesar 2,40 persen dan 14,75 persen.

Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2010 menjadi salah satu daerah yang mengalami penurunan realisasi pendapatan daerah selain Kabupaten Poso yaitu sebesar -2,06 persen dari 424,1 milyar rupiah menjadi 415,3 milyar rupiah. Penurunan realisasi pendapatan daerah disebabkan oleh menurunnya bagian pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar -26,39 persen. Kenaikan realisasi bagian PAD sebesar 2,34 persen dan dana perimbangan sebesar 2,54 persen belum mampu mendorong kenaikan realisasi pendapatan daerah. Penurunan tersebut mengakibatkan bergesernya struktur pendapatan daerah dengan bagian PAD menjadi hanya sebesar 4,81 persen, dana perimbangan sebesar 83,25 persen dan pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 11,94 persen.

Kabupaten Sigi pada tahun anggaran 2010 merealisasikan pendapatan daerah sebesar 473,7 milyar rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 92,32 persen dari realisasi tahun sebelumnya seiring dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah sebagai sebuah daerah yang mandiri. Peningkatan realisasi terjadi di seluruh komponen pendapatan daerah, yaitu PAD sebesar 237,12 persen, bagian dana perimbangan sebesar 64,43 persen dan bagian pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 566,81 persen. Dilihat dari struktur pembentuknya, bagian dana perimbangan mendominasi dengan andil sebesar 80,07 persen, diikuti oleh bagian pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 17,81 persen dan bagian PAD sebesar 2,12 persen.

Total pendapatan daerah Kota Palu tahun anggaran 2010 mencapai 632,8 milyar rupiah atau mengalami peningkatan 12,08 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 564,6 milyar rupiah. Seluruh komponen pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif, PAD mencapai peningkatan sebesar 9,53 persen, dana perimbangan meningkat sebesar 2,80 persen dan pendapatan daerah yang sah lainnya meningkat signifikan sebesar 58,31 persen. PAD Kota Palu sebagai tolok ukur kinerja daerah memiliki andil sebesar 8,99 persen terhadap total pendapatan daerah, besaran andil tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya se-Sulawesi Tengah. Selanjutnya bagian dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah lainnya memberikan andil masing-masing sebesar 68,97 persen dan 22,04 persen.

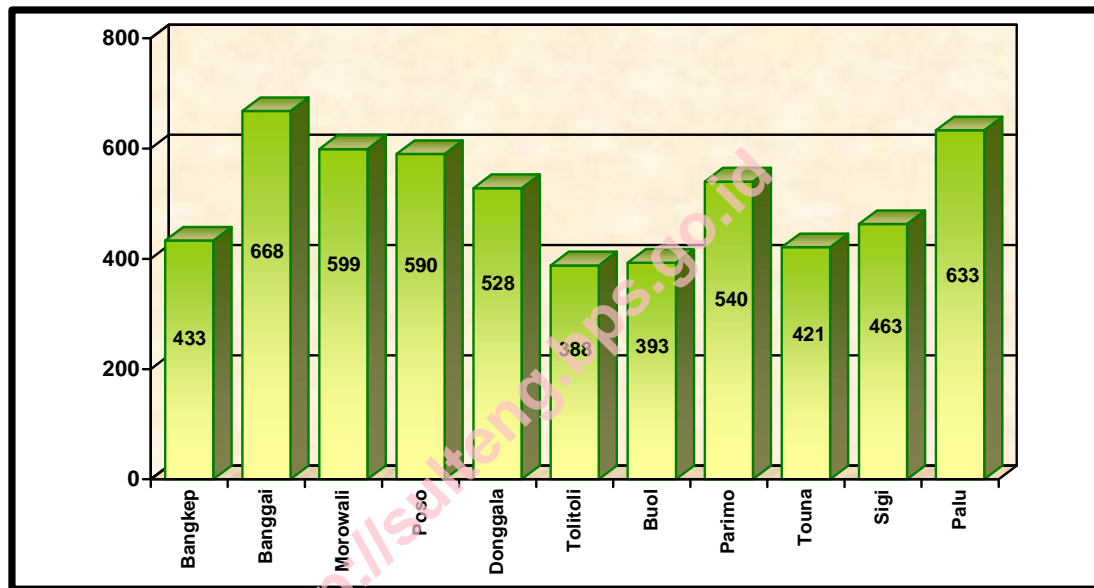
2.4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2010 dibandingkan tahun sebelumnya cukup bervariasi, sebanyak 6 kabupaten/kota mengalami peningkatan sedangkan 5 kabupaten lainnya mengalami penurunan. Peningkatan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi di kabupaten termuda di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Sigi yang mengalami peningkatan realisasi belanja hingga mencapai 100,60 persen. Peningkatan tertinggi kedua terjadi di Kabupaten Donggala sebesar 15,93 persen, selanjutnya Kota Palu meningkat sebesar 13,80 persen, diikuti oleh Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai masing-masing sebesar 8,67 persen, 2,64 persen dan 2,28 persen. Pada saat yang sama Kabupaten Tolitoli tercatat mengalami penurunan tertinggi sebesar -5,66 persen diikuti oleh Kabupaten Buol sebesar -5,39 persen, Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar -4,10 persen, Kabupaten Poso sebesar -3,56 persen dan Kabupaten Tojo Una-una sebesar -3,49 persen.

Belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2010 terrealisasi sebesar 433,1 milyar rupiah, menurun -4,10 persen dari tahun sebelumnya. Komposisi belanja daerah terdiri dari 47,36 persen belanja tidak langsung atau setara dengan 205,1 milyar rupiah dan 52,64 persen belanja langsung atau setara dengan 228 milyar rupiah. Komponen belanja langsung

didominasi oleh belanja modal yang mencapai 72,95 persen, kemudian diikuti oleh belanja barang/jasa sebesar 21,55 persen dan 5,50 persen sisanya dipergunakan untuk porsi belanja pegawai.

Gambar 5.
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2010 (milyar rupiah)



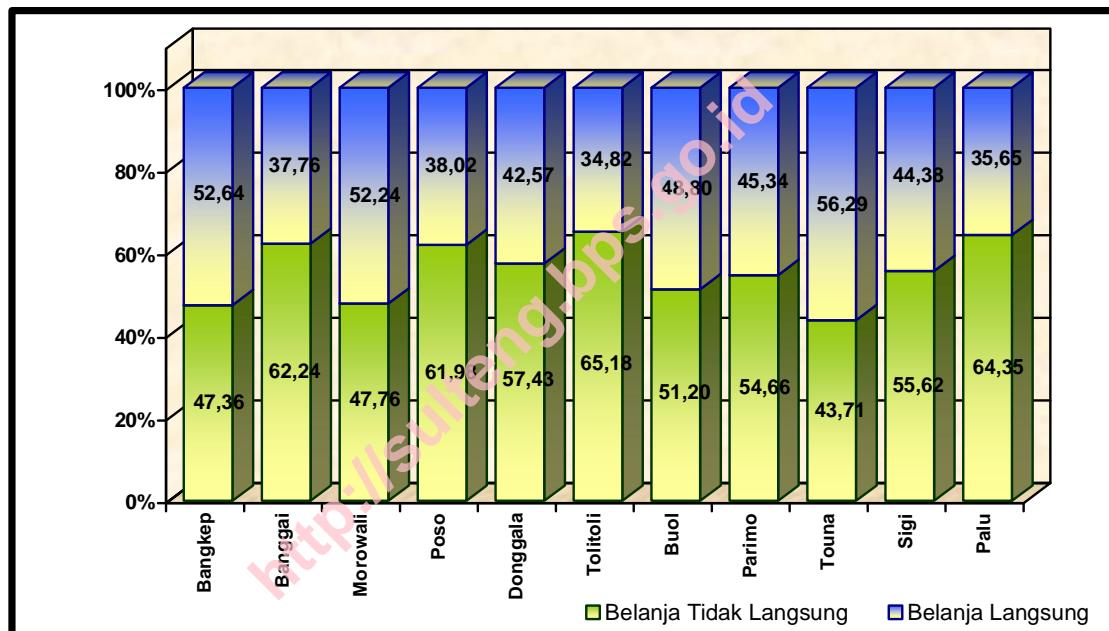
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemda Kab./Kota

Kabupaten Banggai tahun anggaran 2010 berhasil merealisasikan Belanja Daerah sebesar 667,8 milyar rupiah, naik sekitar 14,9 milyar rupiah atau sekitar 2,28 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebesar 62,24 persen direalisasikan untuk belanja tidak langsung, sedangkan 37,76 persen untuk belanja langsung. Dari sekitar 252,1 milyar rupiah keseluruhan belanja langsung, porsi terbesar 62,55 persen digunakan untuk belanja modal sedangkan belanja pegawai dan belanja barang/jasa mendapat porsi masing-masing sebesar 2,07 persen dan 35,38 persen.

Belanja daerah sebesar 598,5 milyar rupiah pada tahun 2010 direalisasikan oleh Kabupaten Morowali. Sebesar 47,76 persen dipergunakan untuk belanja tidak langsung dan 52,24 persen untuk belanja langsung. Jumlah tersebut mengalami

peningkatan sebesar 8,67 persen atau setara dengan 47,7 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Komposisi belanja langsung sebesar 312,7 milyar rupiah dialokasikan sebesar 57,46 persen untuk belanja modal, 35,83 persen untuk belanja barang/jasa dan 6,70 persen untuk belanja pegawai.

Gambar 6.
Struktur Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2010 (dalam %)



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kabupaten Poso tahun 2010 menghabiskan anggaran sebesar 590,0 milyar rupiah untuk belanja daerah atau mengalami penurunan sebesar -3,56 persen dibandingkan belanja tahun sebelumnya. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja tidak langsung yaitu sebesar 61,98 persen, sedangkan belanja langsung mendapat porsi sebesar 38,02 persen. Belanja langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program pemerintah sebesar 224,3 milyar rupiah digunakan untuk belanja pegawai sebesar 9,99 persen, belanja barang/jasa sebesar 45,0 persen dan belanja modal sebesar 45,01 persen.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Donggala tahun 2010 sebesar 528,3 milyar rupiah, meningkat 15,93 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 455,7 milyar rupiah. Pada tahun 2010 ini porsi belanja sebesar 57,43 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung, sedangkan belanja langsung hanya mendapat alokasi belanja sebesar 42,57 persen. Total anggaran belanja langsung sebesar 224,9 milyar rupiah digunakan 8,0 persen untuk belanja pegawai, 37,86 persen untuk belanja barang/jasa dan 54,14 persen belanja modal.

Total belanja daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2010 tercatat sebesar 388 milyar rupiah, menurun -5,66 persen dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Belanja langsung hanya mendapat alokasi dana sebesar 34,82 persen, sedangkan 65,18 persen sisanya untuk alokasi belanja tidak langsung. Sebesar 41,98 persen dari total 135,1 milyar rupiah belanja langsung direalisasikan untuk belanja modal, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang/jasa masing-masing mendapatkan bagian sebesar 11,63 persen dan 46,39 persen.

Kabupaten Buol tercatat mengalami penurunan realisasi belanja sebesar -5,39 persen dari tahun sebelumnya hingga mencapai 392,9 milyar rupiah pada tahun 2010. Realisasi belanja tersebut dimanfaatkan untuk porsi belanja langsung sebesar 48,80 persen dan belanja tidak langsung sebesar 51,20 persen. Sebesar 191,8 milyar rupiah total belanja langsung digunakan untuk belanja modal sebesar 107,1 milyar rupiah atau setara dengan 55,86 persen, sedangkan sebesar 31,20 persen untuk belanja barang/jasa dan 12,94 persen untuk belanja pegawai.

Pada tahun 2010 Kabupaten Parigi Moutong merealisasikan total belanja daerah sebesar 540,2 milyar rupiah, meningkat 2,64 persen dari tahun 2009 sebesar 526,3 milyar rupiah. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar 295,3 milyar rupiah atau sebesar 54,66 persen, sedangkan belanja langsung sebesar 45,34 persen atau sebesar 244,9 milyar rupiah. Alokasi terbanyak dari total belanja langsung sebesar 50,82 persen atau 124,5 milyar rupiah digunakan untuk belanja modal, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang/jasa masing-masing mendapat porsi sebesar 9,99 persen dan 39,20 persen.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2010 mencapai 420,7 milyar rupiah, menurun -3,49 persen dari tahun sebelumnya sebesar 435,9 milyar rupiah. Bagian belanja tidak langsung menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2009 sebesar 38,50 persen, sedangkan bagian belanja langsung mengalami penurunan sebesar -21,84 persen. Sebesar 56,35 persen total belanja daerah atau sejumlah 237 milyar rupiah realisasi belanja langsung dimanfaatkan untuk belanja pegawai sebesar 9,95 persen, belanja barang/jasa sebesar 40,43 persen dan belanja modal sebesar 49,63 persen.

Tahun anggaran 2010 Kabupaten Sigi berhasil merealisasikan anggaran belanja daerah sejumlah 463,4 milyar rupiah, atau meningkat signifikan sebesar 100,60 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Belanja tidak langsung tercatat sejumlah 257,7 milyar rupiah atau sebesar 55,62 persen dan belanja langsung sejumlah 205,6 milyar rupiah atau sebesar 44,38 persen. Total belanja langsung dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal masing-masing sebesar 6,77 persen, 36,62 persen dan 56,62 persen.

Kota Palu pada tahun 2010 merealisasikan belanja daerah sejumlah 632,6 milyar rupiah, meningkat 13,80 persen dari tahun 2009 yang hanya sebesar 555,8 milyar rupiah. Peningkatan realisasi belanja tersebut dipengaruhi oleh peningkatan belanja tidak langsung sebesar 28,88 persen, sementara belanja langsung mengalami penurunan sebesar -6,04 persen dari tahun sebelumnya. Porsi belanja langsung tahun 2010 mencapai 225,5 milyar rupiah atau 35,65 persen dari total belanja daerah, sedangkan 64,35 persen sisanya direalisasikan untuk belanja tidak langsung. Belanja modal mendapat porsi terbesar dari belanja langsung mencapai 105,5 milyar rupiah atau 46,78 persen. Sementara itu belanja pegawai dan belanja barang/jasa masing-masing terealisasi sebesar 32,5 milyar rupiah (14,39 persen) dan 87,5 milyar rupiah (38,83 persen) dari total belanja langsung.

Tabel - Tabel

<http://sulteng.bps.go.id>

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	1 042 484 624	1 052 332 636	1 177 609 898
1. Pendapatan Asli Daerah	278 853 995	275 191 234	411 797 140
1.1. Pajak Daerah	245 120 991	223 061 767	344 354 727
1.2. Retribusi Daerah	19 892 825	20 731 195	29 650 214
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4 093 852	7 525 806	11 384 015
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9 746 326	23 872 466	26 408 183
2. Dana Perimbangan	701 889 828	756 439 213	759 172 266
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	56 566 867	66 985 027	71 244 195
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	606 544 317	629 397 186	659 331 271
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	38 778 644	60 057 000	28 596 800
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61 740 798	20 702 188	6 640 493
3.1. Pendapatan Hibah	11 740 798	18 660 106	2 089 380
3.2. Dana Darurat	50 000 000	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	-	-	4 551 113
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.6. Pendapatan Lainnya	-	2 042 082	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108 000 559	189 511 577	177 052 220
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	1 150 485 183	1 241 844 213	1 354 662 118

Tabel 2.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	954 733 636	1 059 732 420	1 127 256 721
1. Belanja Tidak Langsung	414 235 264	467 376 969	504 698 487
1.1. Belanja Pegawai	225 128 671	258 665 067	291 205 303
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	34 289 279	34 174 084	58 608 736
1.5. Belanja Bantuan Sosial	33 138 730	16 407 713	13 923 701
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	80 057 810	112 284 226	93 456 634
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	41 620 773	45 845 879	47 504 113
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2. Belanja Langsung	540 498 372	592 355 452	622 558 234
2.1. Belanja Pegawai	48 331 512	58 952 351	59 207 689
2.2. Belanja Barang dan Jasa	289 497 278	321 587 886	359 558 245
2.3. Belanja Modal	202 669 581	211 815 214	203 792 301
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6 500 000	5 600 000	6 700 000
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	961 233 636	1 065 332 420	1 133 956 721

Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah

Tabel 3.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	388 196 270	392 849 981	409 615 412
1. Pendapatan Asli Daerah	12 180 099	9 951 622	6 505 839
1.1. Pajak Daerah	1 845 711	1 981 439	2 128 115
1.2. Retribusi Daerah	981 643	1 407 255	884 481
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	47 706	122 537	224 207
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9 305 037	6 440 391	3 269 036
2. Dana Perimbangan	361 048 966	326 811 668	333 786 689
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	26 867 212	23 973 964	27 053 066
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	260 478 688	255 283 704	273 612 923
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	54 820 966	47 554 000	33 120 700
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14 967 203	56 086 691	69 322 884
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	3 500 000	4 165 614	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	5 189 756	2 255 433	5 501 012
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	-	44 474 744	60 221 959
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	6 277 447	5 190 900	3 599 913
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80 953 173	96 265 838	26 852 443
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	469 149 443	489 115 819	436 467 855

Tabel 4.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	379 219 538	451 637 567	433 098 056
1. Belanja Tidak Langsung	130 473 606	156 622 163	205 113 607
1.1. Belanja Pegawai	112 604 722	136 862 367	181 936 110
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	4 857 800	2 475 300	4 526 888
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 415 500	5 991 167	4 135 000
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	11 545 584	11 140 000	14 515 609
1.8. Belanja Tidak Terduga	50 000	153 330	-
2. Belanja Langsung	248 745 932	295 015 404	227 984 449
2.1. Belanja Pegawai	22 066 891	19 069 501	12 544 167
2.2. Belanja Barang dan Jasa	50 878 014	55 886 313	49 120 377
2.3. Belanja Modal	175 801 026	220 059 590	166 319 904
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400 000	200 000	500 000
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	379 619 538	451 837 567	433 598 056

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 5.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	613 679 453	630 106 818	675 358 217
1. Pendapatan Asli Daerah	11 759 362	24 295 252	25 045 048
1.1. Pajak Daerah	4 347 861	5 426 046	6 383 971
1.2. Retribusi Daerah	7 411 501	9 744 345	12 227 869
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	752 216	1 092 442
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	8 372 644	5 340 764
2. Dana Perimbangan	529 177 917	534 518 224	561 520 982
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	29 247 887	31 315 806	38 541 999
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	436 511 030	449 171 418	474 875 783
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	63 419 000	54 031 000	48 103 200
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	72 742 174	71 293 342	88 792 188
3.1. Pendapatan Hibah	11 000 000	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	30 462 751	15 106 078	14 896 241
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	26 894 800	51 265 264	71 401 959
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 384 623	4 922 000	2 493 988
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93 722 159	73 797 814	49 648 705
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	707 401 612	703 904 632	725 006 922

Tabel 6.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	624 963 467	652 865 927	667 762 033
1. Belanja Tidak Langsung	315 055 373	366 188 944	415 617 001
1.1. Belanja Pegawai	298 962 804	331 966 050	391 762 350
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	810 000	1 049 500	694 090
1.4. Belanja Hibah	1 574 780	11 029 382	11 444 982
1.5. Belanja Bantuan Sosial	10 614 374	7 638 090	4 769 555
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	6 935 637
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	2 787 750	14 505 922	-
1.8. Belanja Tidak Terduga	305 665	-	10 387
2. Belanja Langsung	309 908 094	286 676 983	252 145 032
2.1. Belanja Pegawai	17 423 200	6 955 305	5 216 114
2.2. Belanja Barang dan Jasa	107 454 512	96 497 361	89 211 514
2.3. Belanja Modal	185 030 382	183 224 317	157 717 404
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3 000 000	3 312 000	1 997 783
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	627 963 467	656 177 927	669 759 816

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 7.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	540 288 982	530 613 326	590 295 575
1. Pendapatan Asli Daerah	7 741 507	13 254 169	12 193 889
1.1. Pajak Daerah	1 190 712	1 314 528	1 664 101
1.2. Retribusi Daerah	1 857 038	6 438 012	6 932 001
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	352 671	776 595	-
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4 311 085	4 725 033	3 597 787
2. Dana Perimbangan	478 890 437	458 018 229	484 546 259
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	52 442 675	45 845 357	49 827 269
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	373 308 219	368 918 872	393 928 690
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	53 139 543	43 254 000	40 790 300
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53 657 038	59 340 928	93 555 426
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	59 710 959
3.2. Dana Darurat	-	-	867 000
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	6 513 654	8 536 890	6 605 287
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	42 887 756	44 756 878	17 603 612
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 255 627	6 047 160	3 603 732
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	5 164 836
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36 241 652	32 331 394	10 436 601
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	576 530 634	562 944 720	600 732 176

Tabel 8.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun
Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	543 816 569	550 751 525	598 506 393
1. Belanja Tidak Langsung	187 779 462	227 405 086	285 830 302
1.1. Belanja Pegawai	166 367 737	208 065 643	247 473 314
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	2 600 000	7 228 650	12 180 000
1.5. Belanja Bantuan Sosial	6 136 645	9 475 543	8 076 085
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	11 992 500	75 000	16 360 000
1.8. Belanja Tidak Terduga	682 580	2 560 250	1 740 903
2. Belanja Langsung	356 037 107	323 346 439	312 676 091
2.1. Belanja Pegawai	27 156 833	23 317 268	20 964 714
2.2. Belanja Barang dan Jasa	115 326 129	134 986 845	112 033 308
2.3. Belanja Modal	213 554 145	165 042 326	179 678 069
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	382 671	1 756 595	-
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	544 199 240	552 508 120	598 506 393

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 9.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	541 884 885	572 868 472	554 979 291
1. Pendapatan Asli Daerah	11 292 569	23 042 168	21 179 872
1.1. Pajak Daerah	1 901 882	3 576 592	4 031 995
1.2. Retribusi Daerah	4 827 713	10 856 859	9 098 042
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	399 018	819 009	1 251 353
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4 163 955	7 789 726	6 798 480
2. Dana Perimbangan	449 240 401	475 532 246	462 116 890
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	28 261 369	27 445 119	34 660 353
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	352 336 944	379 547 127	387 195 137
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	68 642 087	68 540 000	40 261 400
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	81 351 914	74 294 040	71 682 528
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	6 183 970	9 479 440	9 530 614
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	71 312 317	54 222 875	58 567 652
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 855 627	10 591 725	3 584 261
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11 795 559	88 059 793	48 101 427
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	553 680 444	660 928 265	603 080 718

Tabel 10.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	464 111 553	611 821 139	590 022 316
1. Belanja Tidak Langsung	237 799 242	323 841 276	365 699 027
1.1. Belanja Pegawai	208 579 644	260 985 714	317 186 780
1.2. Belanja Bunga	126 315	45 959	82 193
1.3. Belanja Subsidi	-	-	1 975 000
1.4. Belanja Hibah	-	38 895 116	23 843 400
1.5. Belanja Bantuan Sosial	12 402 563	7 816 717	6 914 434
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	619 000	977 166	977 166
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	15 034 017	13 023 872	13 292 564
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 037 200	2 096 732	1 427 488
2. Belanja Langsung	226 312 311	287 979 863	224 323 289
2.1. Belanja Pegawai	22 880 691	20 281 046	22 402 115
2.2. Belanja Barang dan Jasa	88 583 520	115 530 836	100 947 648
2.3. Belanja Modal	114 848 099	152 167 981	100 973 525
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	588 343	1 005 700	229 325
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	464 699 896	612 826 839	590 251 641

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 11.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	667 563 644	445 774 515	549 069 265
1. Pendapatan Asli Daerah	19 013 425	33 870 327	23 311 791
1.1. Pajak Daerah	10 387 634	13 043 376	14 123 731
1.2. Retribusi Daerah	3 131 463	2 174 500	2 847 079
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	430 701	934 219	1 547 343
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5 063 625	17 718 231	4 793 638
2. Dana Perimbangan	607 868 275	373 232 836	436 622 447
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	28 391 440	20 596 918	32 771 327
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	502 872 835	288 617 918	351 934 720
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	76 604 000	64 018 000	51 916 400
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40 681 943	38 671 352	89 135 477
3.1. Pendapatan Hibah	18 097 878	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	11 044 709	15 849 000	12 125 404
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	6 661 651	19 929 352	72 075 261
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 877 704	2 893 000	4 934 813
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	48 009 893	52 352 627
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	667 563 644	493 784 408	601 421 892

Tabel 12.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	644 879 403	455 726 312	528 326 147
1. Belanja Tidak Langsung	354 062 820	281 100 151	303 444 112
1.1. Belanja Pegawai	302 012 398	220 855 610	263 704 221
1.2. Belanja Bunga	222 113	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	27 873 785	50 027 887	19 696 075
1.5. Belanja Bantuan Sosial	3 822 619	2 117 025	2 514 440
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	846 902	828 338	2 084 720
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	19 284 996	6 632 990	14 688 314
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	638 300	756 342
2. Belanja Langsung	290 816 583	174 626 160	224 882 036
2.1. Belanja Pegawai	27 254 177	16 439 288	17 989 854
2.2. Belanja Barang dan Jasa	91 499 831	78 579 335	85 134 218
2.3. Belanja Modal	172 062 574	79 607 538	121 757 964
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	350 000	2 032 952
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	644 879 403	456 076 312	530 359 099

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 13.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	407 359 175	417 523 437	430 013 283
1. Pendapatan Asli Daerah	14 402 120	19 676 782	13 131 984
1.1. Pajak Daerah	2 453 510	2 804 023	2 575 311
1.2. Retribusi Daerah	6 650 370	8 429 432	7 634 369
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	268 494	887 966	1 073 439
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5 029 745	7 555 360	1 848 864
2. Dana Perimbangan	377 516 774	375 720 377	381 413 653
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	21 677 535	20 848 463	22 833 895
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	304 613 239	307 431 914	319 134 358
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	51 226 000	47 440 000	39 445 400
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15 440 279	22 126 278	35 467 644
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	6 000 000	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	4 694 205	5 459 714	8 847 578
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	1 356 994	13 704 864	18 928 577
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 389 080	2 961 700	7 691 489
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30 375 978	7 332 233	11 823 910
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	437 735 153	424 855 670	441 837 193

Tabel 14.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	428 072 978	411 317 100	388 033 918
1. Belanja Tidak Langsung	206 568 268	200 122 148	252 915 039
1.1. Belanja Pegawai	178 911 472	181 707 596	211 240 945
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	20 722	123 928	-
1.4. Belanja Hibah	6 875 305	592 694	17 714 170
1.5. Belanja Bantuan Sosial	12 761 689	5 085 177	3 276 876
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	418 337	418 765	397 641
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	6 275 224	11 871 573	16 128 572
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 305 518	322 415	4 156 835
2. Belanja Langsung	221 504 710	211 194 952	135 118 879
2.1. Belanja Pegawai	-	18 902 603	15 708 005
2.2. Belanja Barang dan Jasa	73 269 806	76 533 021	62 683 317
2.3. Belanja Modal	148 234 903	115 759 328	56 727 557
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2 329 962	1 714 660	31 137 081
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	430 402 940	413 031 760	419 170 999

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 15.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	355 677 834	415 085 627	426 500 811
1. Pendapatan Asli Daerah	13 363 803	9 272 948	12 725 886
1.1. Pajak Daerah	2 325 704	3 167 022	2 022 081
1.2. Retribusi Daerah	1 459 161	1 746 412	1 890 844
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	463 118	680 910	2 396 359
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9 115 819	3 678 604	6 416 602
2. Dana Perimbangan	321 664 569	335 248 426	359 103 081
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	22 145 669	23 704 738	24 685 904
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	254 338 320	258 595 688	299 404 077
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	45 180 580	52 948 000	35 013 100
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20 649 462	70 564 252	54 671 844
3.1. Pendapatan Hibah	3 975 160	-	-
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	2 761 242	3 289 649	6 343 393
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	13 913 060	66 224 603	40 307 959
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	1 050 000	8 020 492
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33 141 755	14 530 043	13 534 656
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	388 819 589	429 615 670	440 035 467

Tabel 16.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	293 178 933	415 343 564	392 946 927
1. Belanja Tidak Langsung	131 726 730	154 041 599	201 177 609
1.1. Belanja Pegawai	117 229 572	141 665 688	176 303 573
1.2. Belanja Bunga	2 248 437	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	3 251 875	2 600 000
1.4. Belanja Hibah	-	4 612 231	10 771 550
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4 675 451	431 000	573 700
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	495 286	495 287	260 429
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	6 020 360	3 000 000	6 535 000
1.8. Belanja Tidak Terduga	1 057 622	585 518	4 133 358
2. Belanja Langsung	161 452 202	261 301 964	191 769 318
2.1. Belanja Pegawai	13 511 488	19 220 675	24 813 183
2.2. Belanja Barang dan Jasa	52 104 464	74 748 296	59 826 832
2.3. Belanja Modal	95 836 249	167 332 994	107 129 303
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	74 172 250	646 079	36 087 423
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	367 351 183	415 989 643	429 034 350

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 17.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	484 524 653	496 511 943	551 661 598
1. Pendapatan Asli Daerah	11 811 309	11 260 064	13 224 691
1.1. Pajak Daerah	2 169 030	2 790 628	2 963 407
1.2. Retribusi Daerah	3 331 083	3 613 110	4 229 936
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	349 927	-	1 811 463
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5 961 269	4 856 326	4 219 885
2. Dana Perimbangan	444 883 983	460 915 159	457 075 285
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	29 177 870	26 485 502	29 164 698
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	363 764 113	365 471 657	384 004 987
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	51 942 000	68 958 000	43 905 600
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27 829 361	24 336 720	81 361 623
3.1. Pendapatan Hibah	4 250 638	1 049 956	1 533 068
3.2. Dana Darurat	12 000 000	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	7 506 993	9 805 590	13 295 830
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	-	7 346 175	61 899 275
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 071 730	6 135 000	4 633 449
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34 989 952	72 091 553	14 309 156
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	519 514 605	568 603 496	565 970 754

Tabel 18.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	481 964 247	526 300 111	540 208 141
1. Belanja Tidak Langsung	215 179 723	271 331 774	295 277 239
1.1. Belanja Pegawai	172 300 940	202 072 382	255 878 983
1.2. Belanja Bunga	635 702	1 177 278	3 690 389
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	17 298 261	50 027 404	10 420 849
1.5. Belanja Bantuan Sosial	4 485 820	3 834 416	5 169 400
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	120 000	825 212	834 949
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	20 339 000	13 240 082	19 103 000
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	155 000	179 670
2. Belanja Langsung	266 784 524	254 968 337	244 930 902
2.1. Belanja Pegawai	29 292 967	33 335 901	24 459 944
2.2. Belanja Barang dan Jasa	76 226 620	93 149 776	96 004 834
2.3. Belanja Modal	161 264 937	128 482 660	124 466 124
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13 493 930	27 994 229	9 600 000
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	495 458 177	554 294 340	549 808 141

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 19.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	365 747 812	424 037 104	415 285 138
1. Pendapatan Asli Daerah	17 067 274	19 538 482	19 995 802
1.1. Pajak Daerah	1 488 451	2 383 703	1 494 304
1.2. Retribusi Daerah	6 826 251	5 707 038	6 076 083
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	263 163	580 972	1 118 685
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8 489 407	10 866 769	11 306 728
2. Dana Perimbangan	324 330 938	337 140 169	345 708 680
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	24 714 022	23 397 537	29 412 896
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	249 998 728	263 960 632	273 095 484
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	49 618 187	49 782 000	43 200 300
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24 349 599	67 358 452	49 580 655
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	33 773 271
3.2. Dana Darurat	7 000 000	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	3 936 228	6 157 693	6 088 905
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	9 391 320	58 385 760	6 274 250
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 022 050	2 815 000	3 444 228
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66 133 553	54 795 944	35 732 834
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	431 881 365	478 833 048	451 017 972

Tabel 20.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	370 005 903	435 900 214	420 693 262
1. Belanja Tidak Langsung	106 753 888	132 590 106	183 634 312
1.1. Belanja Pegawai	97 713 948	119 381 918	156 036 308
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	2 096 013	2 043 450	15 066 120
1.5. Belanja Bantuan Sosial	1 805 830	1 954 602	1 712 673
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	499 500	-	499 500
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	340 048	8 329 856	7 463 111
1.8. Belanja Tidak Terduga	4 298 548	880 280	2 856 600
2. Belanja Langsung	263 252 015	303 310 107	237 058 949
2.1. Belanja Pegawai	24 710 890	25 416 770	23 576 923
2.2. Belanja Barang dan Jasa	88 094 504	92 265 622	95 837 984
2.3. Belanja Modal	150 446 619	185 627 716	117 644 042
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7 097 000	7 200 000	4 510 000
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	377 102 903	443 100 214	425 203 262

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 21.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	-	246 320 960	473 730 530
1. Pendapatan Asli Daerah	-	2 973 675	10 024 946
1.1. Pajak Daerah	-	891 151	1 451 660
1.2. Retribusi Daerah	-	818 576	1 674 220
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	1 263 948	6 899 065
2. Dana Perimbangan	-	230 691 855	379 319 088
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	-	13 671 833	19 759 832
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	-	215 939 122	329 604 056
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	1 080 900	29 955 200
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	12 655 429	84 386 497
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	72 899 151
3.2. Dana Darurat	-	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	844 829	1 550 902
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	-	8 265 600	-
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	3 545 000	9 936 444
3.6. Pendapatan Lainnya	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	15 300 212
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	-	246 320 960	489 030 742

Tabel 22.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	-	231 020 748	463 420 373
1. Belanja Tidak Langsung	-	169 657 355	257 757 319
1.1. Belanja Pegawai	-	150 377 790	219 116 359
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	-	3 023 108	22 441 872
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-	795 012	1 493 230
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	14 705 857
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	-	15 461 444	-
1.8. Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2. Belanja Langsung	-	61 363 392	205 663 054
2.1. Belanja Pegawai	-	5 147 257	13 920 570
2.2. Belanja Barang dan Jasa	-	29 373 186	75 305 237
2.3. Belanja Modal	-	26 842 949	116 437 247
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	-	231 020 748	463 420 373

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tabel 23.
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Palu
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	490 101 026	564 570 703	632 786 840
1. Pendapatan Asli Daerah	38 198 039	51 946 620	56 895 143
1.1. Pajak Daerah	15 831 553	17 030 143	18 208 754
1.2. Retribusi Daerah	16 362 415	30 716 261	35 005 418
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	135 166	1 170 026	179 393
1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5 818 905	3 030 190	3 501 579
2. Dana Perimbangan	415 124 850	424 515 719	436 405 378
2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak	21 529 650	23 665 393	28 982 863
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	349 457 013	354 620 326	380 493 015
2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	44 138 187	46 230 000	26 929 500
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	36 778 137	88 108 364	139 486 318
3.1. Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2. Dana Darurat	12 000 000	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	13 962 416	14 482 089	16 404 982
3.4. Dana Penyesuaian & Otonomi khusus	7 401 098	12 321 525	96 940 601
3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 414 623	6 859 000	5 402 441
3.6. Pendapatan Lainnya	-	54 445 750	20 738 295
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18 797 617	17 476 252	17 224 476
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	508 898 643	582 046 955	650 011 316

Tabel 24.
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palu
Tahun Anggaran 2008 – 2010 (Ribuan Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA DAERAH (1+2)	479 475 986	555 861 696	632 595 081
1. Belanja Tidak Langsung	256 575 631	315 871 417	407 092 868
1.1. Belanja Pegawai	247 325 183	299 572 014	379 233 786
1.2. Belanja Bunga	-	-	-
1.3. Belanja Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	3 334 710	7 843 800	21 673 226
1.5. Belanja Bantuan Sosial	5 503 561	8 122 196	5 806 318
1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Desa	215 000	215 000	360 438
1.8. Belanja Tidak Terduga	197 177	118 407	19 100
2. Belanja Langsung	222 900 355	239 990 279	225 502 213
2.1. Belanja Pegawai	32 688 719	30 299 747	32 459 715
2.2. Belanja Barang dan Jasa	72 479 242	70 608 978	87 561 903
2.3. Belanja Modal	117 732 394	139 081 554	105 480 595
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17 538 856	12 967 722	4 084 474
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN	497 014 842	568 829 418	636 679 555

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota